

**REKAPITULASI PENGADUAN MASYARAKAT
TRIWULAN III TAHUN 2025**

No.	Nama Pengadu (dapat dirahasiakan)	Media Pengaduan	Isi Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Tindak Lanjut Pengaduan	Tanggal Penyelesaian Pengaduan	Durasi atau Lama Penyelesaian Pengaduan
Juli 2025							
1	NIHIL						
Agustus 2025							
1	Rafid Naufal Majid	WhatsApp (Lapor Mas Bupati)	Penataan Parkir MPP: Usulan Perbaikan & Aksesibilitas Drop-Off	7-Aug-2025	Diberikan penjelasan terkait : 1. Belum tersedianya area parkir motor yang representatif, tertata, dan terlindungi, karena keterbatasan anggaran. Namun, masukan ini akan menjadi bahan evaluasi dan usulan penganggaran ke depannya supaya fasilitas parkir dapat lebih nyaman bagi masyarakat. 2. Akses drop off bagi pemohon yang kurang sehat atau memiliki keterbatasan mobilitas, MPP sudah menyediakan area drop off khusus disabilitas yang mempunyai akses langsung ke lobi, sehingga memudahkan proses antar-jemput tanpa harus berjalan jauh.	8-Aug-2025	1 hari
					Diberikan penjelasan untuk meluruskan persepsi dan memberikan pemahaman yang tepat sesuai ketentuan hukum dan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.		

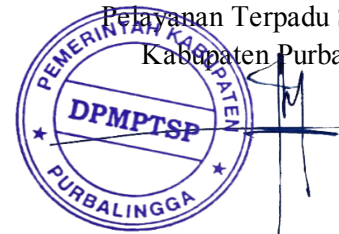
2	Teguh Prayitno	WhatsApp (Lapor Mas Bupati)	Perpanjangan Kontrak Tower: Identifikasi dan Solusi Masalah	8-Aug-2025	1. Tower BTS yang telah berdiri di atas lahan warga atau pihak ketiga hanya diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB), yang kemudian dikenal sebagai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 2. Yang Sebenarnya Terjadi: Perpanjangan Kontrak Sewa Menyewa Lahan. Kontrak tersebut bersifat perdata antara pemilik lahan dan pihak perusahaan, dan tidak melibatkan Pemerintah Daerah secara langsung dalam proses perpanjangannya. 3. Upaya Klarifikasi dan Mediasi	11-Aug-2025	3 hari
3	Anonim	Instagram (Lapor Mas Bupati)	Dugaan Pungli Urus Surat Kecelakaan Lalin untuk UHC di	23-Aug-2025	Disampaikan penjelasan terkait : 1. MPP Kabupaten Purbalingga memberikan layanan kepada masyarakat berpedoman pada SOP yang berlaku. 2. Persyaratan administrasi berupa Surat Keterangan Kecelakaan dari Kepolisian menjadi dokumen wajib yang ditetapkan BPJS Kesehatan untuk membedakan klaim layanan kesehatan akibat penyakit biasa dan kecelakaan lalu lintas	26-Aug-2025	3 hari

			Kepolisian		3. Adanya dugaan pungutan liar di lingkungan institusi Kepolisian (Satlantas), bukan merupakan kewenangan MPP Kabupaten Purbalingga untuk menindaklanjutinya 4. Menyarankan untuk menyampaikan laporan resmi melalui saluran pengaduan internal Kepolisian atau Saber Pungli agar dapat ditanyani sesuai ketentuan hukum yang berlaku		
September 2025							
					Disampaikan penjelasan terkait : 1. Dalam pengaduan sebelumnya yang di disposisi ke Satpol PP, terdapat empat poin tuntutan utama, yaitu : - Pengembalian tembok keliling perumahan sebagaimana mestinya - Pengembalian fasilitas umum (fasum) yang dipakai untuk bangunan MBG - Penolakan akses jalan perumahan sebagai jalur operasional MBG - Penindakan tegas terhadap bangunan ilegal sesuai aturan hukum Kami memahami bahwa keempat tuntutan tersebut merupakan bentuk perhatian dan kepedulian masyarakat terhadap ketertiban lingkungan, keamanan, serta pemanfaatan ruang sesuai fungsinya.		

1	Anonim	WhatsApp (Lapor Mas Bupati)	Tindak Lanjut Aduan UCFKASY9 : Bangunan Yayasan Tak Berizin & Penindakan Pol PP	19-Sep-2025	2. Berdasarkan informasi, Satpol PP Kab Purbalingga telah melakukan tindak lanjut sebagai berikut : - Melakukan penelusuran informasi dan peninjauan lapangan ke lokasi dapur MBG - Telah dilakukan koordinasi dengan Pemerintah Kelurahan Kalikabong serta pemilik Yayasan Bina Cita Karya Bangsa - Pemilik yayasan, sdr. Arizal Yudha Hartanto, ST., MM., telah diberikan pembinaan agar segera mengadakan musyawarah bersama masyarakat yang terdampak dan tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (tibumtranmas) - Dari hasil koordinasi tersebut, diperoleh kesepakatan bahwa pihak yayasan akan segera duduk bersama dengan warga untuk mencari solusi terbaik yang dapat diterima oleh semua pihak.	3-Oct-2025	14 hari
---	--------	-----------------------------	--	-------------	--	------------	---------

				DPMPTSP Kab Purbalingga melalui Dimrumkim telah melakukan koordinasi lintas sektor dengan OPD teknis terkait dalam rangka memastikan tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan perizinan maupun pemanfaatan lahan. Menelusuri status legalitas bangunan dan perizinan usaha yang dijalankan oleh Yayasan Bina Cita Karya Bangsa guna menjamin kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan DPMPTSP Kab Purbalingga sangat mengapresiasi kepedulian warga dalam menjaga lingkungan tempat tinggal yang tertib, aman, dan nyaman. Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini bersama OPD terkait, dan apabila dalam proses ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka langkah-langkah hukum dan administratif akan dilakukan sesuai prosedur.	
Total Pengaduan Masuk Triwulan III Tahun 2025 : 4 Pengaduan					
Total Pengaduan Selesai Triwulan III Tahun 2025 : 4 Pengaduan					

Purbalingga, 3 Oktober 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Purbalingga



Drs. Much Umar Faozi, M.Kes
NIP. 19681022 199402 1 001